



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA NURLINDA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA DAN KEUANGAN
3. NHK : 765450

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.762.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.252.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.205.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.205.000.000
4. Tanah Seluas 400 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 665.900.000

1. MOBIL, FORD FOCUS 2.0L AT-S Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, FORD ESCAPE 2.3L LIMITED A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, BMW 320 I/E90 A/T Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. MOBIL, HONDA DG48 1.5 RS CVT Z Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 310.900.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. 9.500.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.087.237.592**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 20.015.137.592



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 20.015.137.592

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.